

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan landasan teori yang mampu menjelaskan hubungan korelasi antara fakta-fakta yang diamati, sehingga dapat merupakan kerangka orientasi untuk analisis dan membuat ramalan terhadap gejala-gejala baru yang diperkirakan akan terjadi. Dalam menentukan subsektor ekonomi potensial, banyak teori yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan pentingnya pengembangan suatu kota.

2.1 Karakteristik Ekonomi Kota

2.1.1 Kegiatan Ekonomi Kota

Ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan secara umum kota adalah tempat bermukimnya masyarakat kota, tempat untuk bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan lain-lain. Dalam implementasinya, kota merupakan daerah yang memiliki pelayanan administrasi yang baik. Kota sendiri juga berfungsi sebagai pusat perkembangan, pusat absorpsi, sebagai motor pedesaan dan juga sebagai pusat pelayanan. Karena potensi itulah banyak orang desa yang melakukan migrasi ke kota. (Saptiarso, 2009)

Ekonomi kota adalah suatu kegiatan yang dilakukan di suatu kota tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa aspek guna mencapai tujuan bersama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kota itu sendiri. Ekonomi kota sangat memiliki keterkaitan yang dapat mensejahterakan masyarakat kota tersebut dimulai dari adanya pemanfaatan lahan yang mana lahan tersebut digunakan sebagai tempat untuk beraktifitas masyarakat, selain itu juga ekonomi kota berkaitan dengan kesempatan kerja bagi masyarakatnya. Dalam definisi lainnya dijelaskan bahwa kota secara ekonomi merupakan suatu tempat dimana terdapat kegiatan usaha masyarakat yang beragam (heterogen) dengan dominasi sektor kegiatan non pertanian. (Saptiarso, 2009)

Kota merupakan pusat berbagai kegiatan. Misalnya pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, industri, transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi di kota lebih beragam. Berbeda dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di pedesaan, pegunungan, atau daerah pantai. Jenis kegiatan ekonomi di daerah perkotaan antara lain sebagai berikut (Saptiarso, 2009).

1. Bidang Jasa

Sebagian besar jenis kegiatan ekonomi di perkotaan adalah bidang jasa atau pelayanan untuk orang lain. Kegiatan jasa dapat berupa tenaga keahlian, pikiran, atau keterampilannya. Jenis kegiatan di bidang jasa antara lain dokter dan tenaga medis, guru, pengacara, teknisi, konsultan, montir, kapster (salon), dan lain-lain.

2. Bidang Perdagangan

Jenis kegiatan ekonomi bidang perdagangan terdapat di semua wilayah, baik perkotaan, pedesaan, pantai, maupun pegunungan. Namun, perdagangan di perkotaan mengalami kemajuan yang lebih pesat dan beraneka ragam. Perdagangan merupakan kegiatan jual beli di pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan perdagangan dapat berupa pasar, warung, dan toko yang menjual kebutuhan sehari-hari secara eceran sesuai kebutuhan pembeli.

Bidang perdagangan menjadi alternatif utama kegiatan masyarakat perkotaan karena dapat menopang kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, perdagangan menawarkan peluang pekerjaan yang lebih menjanjikan. Kegiatan ekonomi lain yang berhubungan dengan perdagangan antara lain pramuniaga/pelayan toko, *sales*/ orang yang menawarkan barang, kasir, dan buruh angkut. Dalam perkembangan perdagangan muncul pasar modern. Bentuk pasar modern yaitu swalayan, mini market, supermarket, dan *departement store*. Selain itu, masih banyak lagi kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh perseorangan. Misalnya pedagang kaki lima (PKL) pedagang asongan, warung, dan lain-lain.

3. Bidang Industri

Jenis kegiatan lain di perkotaan adalah bidang industri. Bidang industri merupakan jenis kegiatan ekonomi yang bertujuan mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau bahan jadi. Bidang industri biasanya tidak bisa

dilaksanakan di semua wilayah. Penempatan bidang industri tergantung pada banyak faktor. Di antaranya sumber bahan baku, tenaga kerja, dan transportasi. Faktor-faktor tersebut membuat sebagian besar industri dibangun di kota. Bidang industri terbagi menjadi tiga jenis. Ada industri kecil, industri dasar dan menengah, serta industri besar.

a. Industri Kecil

Industri kecil dilakukan perorangan. Modalnya sedikit atau sering disebut *home industry*. Misalnya pembuatan tempe dan tahu, kerajinan, dan pengolahan makanan.

b. Industri Menengah

Biasanya dilakukan perorangan dengan modal sedang. Misalnya pembuatan kecap, pabrik roti, pembuatan pakaian, dan produksi sepatu.

c. Industri Besar

Biasanya membutuhkan banyak tenaga kerja dan modal usaha yang besar. Sering dilakukan secara berkelompok atau kerja sama. Bidang industri merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan banyak lapangan pekerjaan.

4. Bidang Perhubungan

Jenis kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk melancarkan arus distribusi barang dan pergerakan manusia. Jenis kegiatan perhubungan meliputi darat, laut, dan udara.

a. Perhubungan Darat

Sarana pendukung transportasi darat adalah becak, delman, angkutan kota, taksi, bus, dan kereta api. Jenis lapangan pekerjaan yang tersedia di bidang perhubungan darat antara lain tukang becak, kusir, sopir, masinis, dan lain-lain.

b. Perhubungan Laut (Air)

Alat transportasi laut (air) contohnya perahu motor, kapal feri, dan kapal motor. Jenis lapangan pekerjaan yang tersedia di bidang perhubungan laut (air) adalah nahkoda, kelasi, buruh angkut, ABK, penarik tiket kapal, agen penjualan tiket, dan lain-lain.

c. Perhubungan Udara

Alat transportasi udara adalah pesawat terbang. Jenis pekerjaan yang tersedia di bidang perhubungan udara adalah pilot, pengawas bandara, dan pramugari.

5. Bidang Bangunan

Bidang bangunan menyebar di seluruh wilayah Nusantara. Kebanyakan dilaksanakan di kota karena banyaknya pembangunan perumahan dan gedung. Tenaga kerja yang diperlukan untuk bidang bangunan cukup banyak. Ada arsitek dan insinyur sipil sebagai perancang bangunan dan pemilih bahan bangunan yang akan digunakan. Selain itu, juga diperlukan pemborong. Tugas pemborong yaitu menghitung biaya pembangunan, waktu yang diperlukan, dan tenaga yang dibutuhkan. Jenis pekerjaan lain yang tersedia di bidang pembangunan adalah mandor, pekerja bangunan, penyedia bahan bangunan, dan lain-lain.

2.1.2 Struktur Ekonomi Kota

Suatu kota terlihat berkembang selain dilihat dari pendapatan perkapita, tetapi juga dilihat dari kemampuan struktur perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap sektor-sektor lain juga memberikan kontribusi yang besar terhadap total PDRB suatu kota, sehingga saling berkaitan antara pendapatan perkapita dengan struktur perekonomian. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi yang besar maka akan mempengaruhi terhadap besarnya PDRB dan pendapatan perkapita juga akan meningkat, juga sebaliknya. Struktur perekonomian kota akan berkembang apabila terjadi : Peningkatan kontribusi, Penurunan kontribusi dan Kontribusi tetap. (Jawa Barat Dalam Angka, 2010).

Struktur ekonomi perkotaan dipengaruhi oleh sumberdaya yang tersedia di kota tersebut, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Salah satu hambatan dalam pengembangan ekonomi suatu kota adalah adanya ledakan penduduk. United Nation (UN) memberikan rekomendasi secara makro, bahwa struktur peronomian yang ada diklasifikasikan menjadi :

a) Primer

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian

- b) Sekunder
 1. Industri Pengolahan
 2. Listrik, Gas, Air minum
 3. Bangunan dan konstruksi
- c) Tersier
 1. Perdagangan, Hotel dan Restoran
 2. Pengangkutan dan komunikasi
 3. Lembaga Keuangan
 4. Jasa-jasa

2.2 Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

2.2.1 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2002), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Hicks mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunaannya telah cukup dikenal. Sedangkan menurut Simon Kuznet dalam Jhingan (2002), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Ahli-ahli ekonomi telah lama memandang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sukirno 1994) yaitu:

a. Tanah dan kekayaan alam lain:

Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses

pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara dimana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer yaitu sektor dimana kekayaan alam terdapat kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di satu pihak, dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis barang kegiatan ekonomi di lain pihak, sehingga membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi. Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat kemungkinannya untuk memperoleh keuntungan tersebut dan menarik pengusaha-pengusaha dari negara-negara/daerah-daerah yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut. Modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha tersebut dari luar memungkinkan kekayaan alam itu diusahakan secara efisien dan menguntungkan.

b. Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja:

Penduduk yang bertambah dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Selain itu pula perkembangan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar yang diakibatkannya. Besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan dalam suatu perekonomian tergantung pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Akibat buruk dari penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika jumlah penduduk tidak sebanding dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia. Ini berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam tingkat produksi atau pun kalau bertambah, pertambahan tersebut akan lambat sekali dan tidak mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi:

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi itu. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan maka kemajuan yang akan dicapai akan jauh lebih rendah.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat:

Sikap masyarakat dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar pada pertumbuhan ekonomi. Sikap itu diantaranya adalah sikap menghemat untuk mengumpulkan lebih besar uang untuk investasi, sikap kerja keras dan kegiatan-kegiatan mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu menambah pendapatan dan keuntungan. Disisi lain sikap masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara-cara produksi yang modern dan yang produktivitasnya tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat.

e. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan:

Adam Smith (telah) menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi oleh luasnya pasar, dan spesialisasi yang terbatas membatasi pertumbuhan ekonomi. Pandangan Smith ini menunjukkan bahwa sejak lama orang telah lama menyadari tentang pentingnya luas pasar dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila luas pasar terbatas, tidak ada dorongan kepada para pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya tinggi. Karena produktivitasnya rendah maka pendapatan para pekerja tetap rendah, dan ini selanjutnya membatasi pasar.

Profesor Kuznets (dalam Todaro, 1994) juga mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

- a) Tingkat penambahan output perkapita dan penambahan penduduk yang tinggi.
- b) Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas tenaga kerja.
- c) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
- d) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
- e) Adanya kecenderungan daerah yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian daerah lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku.
- f) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

2.2.2 Proses Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Yang dimaksud dengan potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian kota tersebut secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Sebelum menyusun strategi pengembangan terlebih dahulu harus mengetahui akan kekuatan maupun kelemahan dalam pengembnagn ekonominya. Dengan mengetahui hal tersebut maka akan lebih tepat dalam menyusun strategi guna mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Di sinilah dirasakan perlunya inventarisasi kekayaan (asset), yang mana termasuk juga sumberdaya alam dan lingkungan (Suparmoko,2001).

Tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah untuk meningkatkan pendapatan riel per kapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada, langkah-langkah berikut dapat ditempuh dengan (Suparmoko,2001) :

1. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor.
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
3. Mengidentifikasi sumberdaya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumberdaya manusianya dan yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan tiap setiap sektor bersangkutan.
4. Dengan menggunakan model pembobotan terhadap variabel-variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan sub sektor, maka akan ditemukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan.
5. Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk mengembnagkan sektor-sektor andalan yang kan menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembnag dengan sendirinya secara berkelanjutan.

2.2.3 Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Strategi pengembangan potensi ekonomi akan tergantung pada strategi pengembangan ekonomi yang dianutnya. Beberapa strategi pembangunan ekonomikota dapat disebutkan di bawah ini (Suparmoko,2001):

a. Pembangunan Pertanian dengan Industri

Perekonomian suatu daerah dapat dikelompokan menjadi bayak sektor (sebelas sektor usaha menurut BPS dalam sistem neraca regional atau nasional). Namun secara garis besar dalam kaitannya denagn pembangunan ekonomi daerah perhatian dipusatkan pada dua sektor utama yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Sektor pertanian sebagai sektor yang berhubungan erat dengan mengolah langsung sumberdaya alam yang tersedia di bumi (alam) dan sektor industri sebagai sektor kegiatan yang mengelola bahan/masukan yang diambil dari alam dan diolah lanjut menjadi barang produksi ataupun barang konsumsi. Dengan melihat kondisi sumberdaya alam yang ada, terutama tersedianya tanah pertanian,

dan jumlah serta teknologi yang ada, dapat kita tentukan bahwa satu daerah mempunyai potensi yang kuat dalam mengembangkan sektor pertanian atau sektor industri. Walaupun pangan merupakan kebutuhan pokok penduduk suatu daerah, tetapi dengan terbentuknya sistem perekonomian daerah, tidak berarti bahwa daerah yang bersangkutan harus menyediakan dan menaghasilkan bahan pangan sendiri, karena sesungguhnya daerah tersebut dapat mengimpor atau mendatangkannya dari daerah lain. Daerah tersebut dapat berkonsentrasi untuk menghasilkan produk pertanian yang menghasilkan keuntungan bersaing, atau pula dapat menghasilkan produk industri pengolahan asalkan syarat keuntungan kompetitif itu dapat diraih.

b. Melihat Kedalam (Inward Looking) dengan Melihat Keluar (outward looking)

Strategi ini sebenarnya bertumpu pada peranan pasar. Kegiatan produksi barang jasa tentunya tidak akan berhenti setelah barang dan jasa dihasilkan, melainkan harus dilanjutkannya sampai dengan memasarkan barang dan jasa tersebut. Sesungguhnya basis untuk pengembangan sedapat mungkin adalah pasar di daerah sendiri, karena dengan demikian pengeluaran konsumen atau produsen di daerah sendiri akan menciptakan penggandaan (multiflier) di daerah yang bersangkutan. Peranan pasar di luar daerah juga penting dalam arti kalau pasar di daerah sendiri sudah tidak dapat menampungnya (jenuh). Pengiriman barang dan jasa keluar daerah atau bahkan ke luar negeri sedapat mungkin dalam bentuk produk akhir agar nilai tambah yang tercipta di dalam daerah yang bersangkutan cukup tinggi. Penjualan atau pengiriman barang dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku sedapat mungkin dihindari. Disamping itu pasar di daerah sendiri umumnya sudah tersedia yang tampak dari aliran barang dan jasa dari luar daerah ataupun luar negeri..

c. Titik Pertumbuhan (growing point)

Dalam mengamati kemungkinan perkembangan suatu perekonomian perlu diperhatikan simpul-simpul pertumbuhan yang ada. Kegiatan yang ada pada simpul atau titik pertumbuhan ini biasanya akan mampu menyebar ke sektor atau daerah lain melalui kekuatan permintaan dan penawaran yang ada. Pertumbuhan

dengan pola ini biasanya akan mengikuti pola pertumbuhan yang sifatnya tidak seimbang. Kekuatan permintaan yang terlalu besar akan mendorong diciptakannya kegiatan dan produksi tertentu yang sering kali menjadi berlebihan. Pada gilirannya kegiatan ini akan menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa serta kegiatan lain yang biasanya akan berkembang terlalu cepat dan menciptakan kelebihan permintaan lagi. Dalam kasus ini biasanya pemerintah mempunyai peranan penting untuk mengatasi kemacetan-kemacetan pertumbuhan yang terjadi dengan cara menyediakan perijinan dan prasarana, maupun perpajakan dan distribusi sebagai alat kontrolnya.

d. Kaitan Kebelakang (Backward Linkages) dan Kaitan Ke Depan (Forward Linkages)

Dalam pengembangan suatu daerah perlu diperhatikan sektor-sektor atau kegiatan-kegiatan mana yang mempunyai banyak keterkaitan sektor atau kegiatan lain. Semakin banyak keterkaitannya, maka akan semakin cepat perekonomian di daerah itu akan berkembang. Kaitan dapat bersifat ke belakang atau ke depan. Kaitan ke belakang berarti pengembangan sektor lain sebagai tempat menjual. Kalau pemerintah berperan mengarahkan kegiatan perekonomian, sebaliknya kegiatan diarahkan pada kegiatan yang mempunyai keterkaitan ke depan maupun ke belakang yang panjang.

e. Sektor Pemimpin (Leading Sectors)

Dalam suatu perekonomian perlu dipikirkan sekali lagi mengenai sektor-sektor yang mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itu dapat dilihat pada laju pertumbuhannya dalam menyumbang pada pembentukan PDRB. Untuk sektor-sektor yang memiliki laju pertumbuhan tinggi biasanya sudah atau sedang tercipta sistem dan prasarana yang menunjukkan pertumbuhan sektor tersebut. Dalam hal demikian, maka sektor yang mempunyai laju pertumbuhan tinggi dapat terus didorong dengan kebijakan pemerintah daerah. Berhubung kegiatan-kegiatan dalam perekonomian selalu saling kait mengkait, maka pertumbuhan sektor yang satu akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan pada sektor lain pula. Pertumbuhan akan lebih mudah terjadi pada sektor yang sedang bertumbuh dari pada sektor yang mengalami kemacetan.

2.3 Sektor Unggulan Dalam Pengembangan Ekonomi Kota

A. Pengertian Sektor Unggulan

Menurut Tumenggung (1996) sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dalam bentuk sektor sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang besar. Pengertian lain mengenai sektor unggulan yaitu satu grup sektor/subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Manfaat mengetahui sektor unggulan yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progres*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan” (<http://www.bi.go.id>).

Pengertian sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik (<http://repository.usu.ac.id/>).

Jadi sektor unggulan merupakan sektor kegiatan usaha yang mana mampu diunggulkan dalam rangka pengembangan dan pembangunan ekonomi suatu daerah. Adapun sektor unggulan dari tiap tiap daerah sangat berbeda tergantung dari potensi yang dimiliki daerah tersebut dimana sektor unggulan tersebut akan

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena akan memberikan keuntungan kompetitif atau komparatif yang selanjutnya akan mendorong pengembangan ekspor barang maupun jasa.

B. Kriteria Sektor Unggulan

Salah satu kriteria penentuan sektor unggulan ekonomi suatu kota adalah berbasis sumber daya lokal spesifik. Sektor usaha yang dianalisis didasarkan atas potensi existing di kota penelitian. Menurut (Mulyanto,1999) dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat dikembangkan untuk mendukung kontribusinya terhadap pendapatan daerah, dilakukan dengan pendekatan yang menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB meningkat disuatu wilayah dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusi sektor.
2. Kesejahteraan penduduk meningkat, hal ini berpengaruh juga terhadap perkembangan sektor.
3. Efisiensi investasi, yaitu investasi yang kecil dapat menghasilkan output yang sebesar-besarnya.
4. Memiliki skala ekonomi yang besar sehingga potensial untuk dikembangkan.
5. Mempunyai kontribusi yang besar terhadap kegiatan ekonomi.
6. Menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar.
7. Memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan, baik dalam lingkup propinsi maupun nasional.
8. Ketersediaan sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia, dan prasarana dan sarana yang cukup, baik kuantitas maupun secara kualitas ekonomis untuk pengembangan usaha tersebut.

Mawardi (1997) mengartikan bahwa yang dimaksud sektor unggulan adalah sebagai berikut :

- a. Sektor yang mempunyai nilai tambah dan produksi yang besar, sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian lokal, regional (wilayah yang lebih luas).

- b. Sektor yang mempunyai multiplier effect yang besar terhadap kegiatan perekonomian lain dan pengembangan kawasan sekitarnya.
- c. Sektor yang mempunyai permintaan yang tinggi, baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

2.4 Sektor Potensial Dalam Pengembangan Ekonomi Kota

Dilihat dari konsep sektor unggulan diatas yang mana pada sektor unggulan melihat pada persaingan dengan wilayah/daerah lainnya, sedangkan dalam studi ini tidak melihat persaingan dengan wilayah/daerah lain maka untuk selanjutnya sektor unggulan tersebut pada studi ini dianggap sebagai sektor potensial. Sektor potensial merupakan kemampuan ekonomi yang dimiliki yang mungkin atau layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002). Kegiatan pertama yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan adalah mengadakan tinjauan keadaan, permasalahan dan potensi potensi pembangunan. Berdasarkan potensi sumber daya alam yang kita miliki, maka adanya sektor potensial harus dikembangkan dengan seoptimal mungkin.

Dalam pengembangan sektor perekonomian tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor akan tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektor sektor perekonomian yang potensi berkembangnya cukup besar. Karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor-sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor potensial tersebut. (Tjokroaminoto 1995).

Berdasarkan kriteria yang disampaikan diatas, maka dalam studi ini kriteria yang akan digunakan penulis dalam menentukan sub sektor ekonomi potensial meliputi :

1. Sub sektor dengan kontribusi dan laju pertumbuhan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian.
2. Sub sektor yang memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan.

3. Sub sektor yang memiliki kemampuan kompetitif yang besar terhadap sistem perekonomian dan pertumbuhan aktifitas ekonomi.
4. Sub sektor yang mempunyai multiplier atau dampak yang besar terhadap kegiatan perekonomian.
5. Sub sektor yang mempunyai kaitan-kaitan antar sub-sektor yang kuat dengan sub sektor lainnya.

2.5 Fungsi Kota

Fungsi kota adalah penentuan kegiatan kota yang ditetapkan berdasarkan hirarki perkotaan dengan indikator berupa kelengkapan fasilitas pelayanan kota (Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003). Menurut Bratakusumah (2003), fungsi kota adalah berupa pelayanan yang dapat diberikan oleh fasilitas-fasilitas umum, baik milik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat luas selaku pelanggan (*customer*). Fungsi kota adalah sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana serta pergantian moda transportasi. Dalam pengembangan wilayah, fungsi kota terbagi menjadi:

1. Kota sebagai bagian dari sistem perwilayahan
 - Kota membentuk sistem perkotaan di dalam wilayah, dengan menempatkan fungsi kota sesuai dengan potensi/kapasitas pengembangannya, misalnya dengan membentuk hirarki kota.
 - Kota membentuk jaringan pelayanan sosial ekonomi di dalam wilayah, dengan menempatkan fungsi kota sebagai pusat pengembangan dan pelayanan penduduk.
2. Kota berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah
 - Pusat Kegiatan Nasional (PKN), karena memiliki ruang lingkup pelayanan dan pengembangan nasional.
 - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), karena memiliki ruang lingkup pelayanan dan pengembangan skala wilayah propinsi dan atau kabupaten.
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL), karena memiliki ruang lingkup pelayanan dan pengembangan skala lokal.

3. Jenis fungsi pelayanan kota

- Pelayanan Pengumpul Hasil Pertanian: Sebagai pengumpul hasil produk pertanian dari wilayah pengembangannya.
- Kawasan Konsumen: Sebagai lokasi konsumen bagi hasil produk pertanian dan industri.
- Pelayanan Sosial: Sebagai penyedia pelayanan sosial, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dll.
- Pelayanan Ekonomi: Sebagai penyedia pelayanan ekonomi, seperti pertokoan, penyedia konsumen, dll.
- Penyedia Lapangan Pekerjaan: Sebagai penyedia berbagai lapangan pekerjaan yang heterogen.

Menurut Richardson (2001), dalam teori tempat pusat dinyatakan bahwa fungsi pokok suatu pusat kota adalah sebagai pusat pelayanan, penyuplai barang-barang dan jasa sentral seperti jasa eceran, perdagangan, perbankan dan profesional, fasilitas pendidikan, hiburan, kebudayaan dan jasa-jasa pemerintahan.

Menurut Jayadinata (1999), dalam kegiatan sosial ekonomi terdapat suatu istilah, yaitu ambang (*threshold*), yang berarti jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk menunjang supaya suatu fungsi tertentu dapat berjalan lancar. Misalnya suatu macam prasarana yang lebih tinggi fungsinya, atau yang diperlukan oleh jumlah penduduk yang besar jumlahnya (pasar, sekolah, dan sebagainya), harus terletak di wilayah yang jangkauan pelayanannya yang lebih luas. Macam-macam fungsi/fasilitas menurut Jayadinata (1999) adalah:

1. Perlindungan, yaitu rumah.
2. Pelayanan umum, yaitu fasilitas kesehatan, dan keamanan, misalnya balai pengobatan, rumah sakit, dan sebagainya.
3. Kehidupan ekonomi, yaitu pasar, bank, toko, pelabuhan, dan sebagainya.
4. Kebudayaan, misalnya sekolah, kantor pemerintah, bioskop, museum, perpustakaan, dan sebagainya.
5. Kehidupan sosial, misalnya lapangan olah raga, tempat rekreasi, dan sebagainya.

Fungsi suatu kota dipengaruhi oleh hirarki suatu kota, menurut Rondinelli (1983). Kota-kota menengah dan kecil mempunyai fungsi yang dapat digolongkan menjadi 8 bagian, yaitu:

1. Pusat pelayanan umum dan sosial,
2. Pusat komersial dan pelayanan jasa,
3. Pusat pemasaran dan perdagangan regional,
4. Pusat penyediaan dan pemrosesan produk pertanian,
5. Pusat industri kecil,
6. Pusat transportasi dan komunikasi regional,
7. Pusat penarik migrasi dari pedesaan dan sumber pendapatan bagi daerah pedesaan,
8. Pusat transformasi sosial.

Menurut Tarigan (2005), hirarki perkotaan menggambarkan jenjang fungsi perkotaan sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di kota tersebut. Perbedaan fungsi ini umumnya terkait langsung dengan perbedaan besarnya kota (jumlah penduduk), sekaligus menggambarkan perbedaan luas pengaruh.

Hirarki perkotaan sangat diperlukan dalam perencanaan karena menyangkut fungsi yang ingin diarahkan untuk masing-masing kota. Terlaksananya fungsi itu berkaitan dengan fasilitas kepentingan umum yang akan dibangun di masing-masing kota. Banyaknya fasilitas yang harus tersedia di masing-masing kota harus sejalan dengan wilayah pengaruh kota tersebut, atau jumlah penduduk yang diperkirakan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Fungsi utama kota dapat pula digunakan untuk membuat klasifikasi suatu kota, yaitu sebagai (Bintarto, 1989):

1. Kota pusat produksi, biasanya terletak dikelilingi oleh daerah penghasil bumi atau hasil tambang, sehingga dapat terjadi dua macam kota yaitu kota sebagai penghasil bahan mentah dan kota yang mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang jadi. Di daerah ini dapat timbul daerah dengan kota-kota industri, dimana pusat kota tersebut dihubungkan dengan jalur transportasi antara kota dengan kota dan kota dengan daerah belakangnya.

2. Kota pusat perdagangan, merupakan sifat umum kota tapi tidak semua kota didominasi oleh kegiatan perdagangan. Ada yang hanya merupakan penyalur kebutuhan sehari-hari warga, adapula yang merupakan perantara bagi perdagangan nasional maupun internasional.
3. Kota pusat pemerintahan, banyak ditemukan sebelum revolusi industri.
4. Kota pusat budaya, selain dikenal sebagai kota yang memiliki seni dan budaya, beberapa kota di Indonesia menjadi tempat rekreasi dan pusat pariwisata.

Seperti yang terjadi pada kebanyakan kota-kota di Indonesia, perkembangan sebagian besar terjadinya kota adalah berawal dari desa yang mengalami perkembangan yang pesat. Faktor yang mendorong perkembangan desa menjadi kota adalah karena desa berhasil menjadi pusat-pusat kegiatan tertentu, misalnya menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pertambangan, pusat pergantian transportasi, dan lain-lain.

2.6 Tinjauan Kebijakan

2.6.1 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber daya alam daerah di Indonesia yang tidak merata juga merupakan salah satu penyebab diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang memudahkan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadipendapatan nasional. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa daerah yang pembangunannya memang harus lebih cepat daripada daerah lain. Karena itulah pemerintah pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yang disebut otonomi daerah.

Pada kenyataannya, otonomi daerah itu sendiri tidak bisa diserahkan begitu saja pada pemerintah daerah. Selain diatur dalam perundang-undangan, pemerintah pusat juga harus mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

A. Pengertian Otonomi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Wewenang Otonomi Daerah

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintah pusat. Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah yaitu :

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Dampak Positif Dan Negatif Otonomi Daerah

1. Dampak Positif

Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih menegati keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya dari pada pemerintah pusat.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu

dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti. Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan.

2.6.2 Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Dengan adanya Undang-Undang No 33 tentang desentralisasi dan perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terjadi pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta implementasi kebijakan yang lebih fokus dan terarah sehingga meningkat efektifitas dan efisiensi kinerjanya. Kebijakan desentralisasi fiskal dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dasar pemikirannya adalah dengan desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi, penggunaan dana APBD lebih tepat guna dan berdaya guna karena pemerintah kabupaten/ kota (daerah otonom) lebih mengetahui kondisi kebutuhan dan preferensi pembangunan daerah lokal.

Dengan berlakunya Kebijakan Desentralisasi Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang semakin luas kepada daerah untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan potensi dan sumber pendanaan yang dimiliki. Sehingga diharapkan apabila pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Dengan Undang-Undang yang baru, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kebebasan dan keleluasaan yang lebih besar untuk melakukan terobosan-terobosan baru guna meningkatkan sumber pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.6.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan mengenai dana perimbangan yang mana dana tersebut bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari :

a. Pajak ,dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- Pajak bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya disebut BPHTB, merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND) yang merupakan Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku.

- b. Dana Bagian Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari:
- Kehutanan; Dana Bagi Hasil Kehutanan berasal dari :
 1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
 2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara
 3. Dana Reboisasi (DR).adalah dana yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
 - Pertambangan Umum; DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Umum berasal dari :
 - a. Iuran Tetap (Land-rent); yaitu iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
 - b. Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.
 - Perikanan; DBH Sumber Daya Alam Perikanan berasal dari :
 - a. Pungutan Pengusahaan Perikanan; yang merupakan pungutan hasil perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia.
 - b. Pungutan Hasil Perikanan; yang merupakan pungutan hasil perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang

melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh.

- Pertambangan Minyak Bumi; berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
- Pertambangan Gas Bumi; dan
- Pertambangan Panas Bumi.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi; dan kabupaten/kota.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana yang menjadi urusan daerah.

2.7 Metode Analisis Penentuan Subsektor Ekonomi Potensial

2.7.1 Analisis Location Question (LQ)

Location Quotient (LQ) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/ industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/ industri tersebut secara nasional. Rumusnya adalah sebagai berikut (Warpani, 1984).

$$\boxed{LQ = \frac{Si/Ni}{S/N}} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

S_i = Jumlah buruh/ produksi I di daerah yang diselidiki

S = Jumlah buruh/ produksi seluruhnya di daerah yang diselidiki

N_i = Jumlah buruh/ produksi i di seluruh daerah yang lebih luas dimana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya.

N = Jumlah seluruh buruh/ produksi di seluruh daerah yang lebih luas, dimana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya.

Istilah wilayah nasional dapat diartikan untuk wilayah induk/wilayah atasan. Misalnya apabila perbandingan antar wilayah kabupaten dengan provinsi, maka provinsi memegang peran sebagai wilayah nasional, dan seterusnya.

Apabila $LQ > 1$ artinya peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol dari pada peran sektor secara nasional. Sebaliknya, apabila $LQ < 1$ maka peranan sektor itu di daerah tersebut lebih kecil dari pada peranan sektor tersebut secara nasional. $LQ > 1$ menunjukkan bahwa peranan sektor i cukup menonjol di daerah tersebut dan sering kali sebagai petunjuk bahwa daerah tersebut surplus akan produk sektor i dan mengekspor ke daerah lain. Daerah itu hanya mungkin mengekspor produk ke daerah lain atau luar negeri kalau mampu menghasilkan produk tersebut secara lebih murah atau lebih efisien. Atas dasar itu $LQ > 1$ secara tidak langsung memberikan petunjuk bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor i di maksud.

A. Kriteria dan jangkauan pelayanan LQ:

1. $LQ > 1$; artinya sektor tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri juga memberikan peluang untuk mengekspor kewilayah lain, atau sektor tersebut memiliki suplai input-output yang lebih besar dari kebutuhan lokal sehingga mempunyai potensi ekspor.
2. $LQ = 1$; artinya sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri, atau sektor tersebut mampu menentukan permintaan input-output dalam wilayah sendiri dapat dikatakan wilayah tersebut dalam kondisi perekonomian seimbang.
3. $LQ < 1$; sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri, atau sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan input-

output wilayahnya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dibutuhkan impor.

B. Keunggulan Metode Locational Quotient (LQ)

Ada beberapa keunggulan dari metode LQ, antara lain:

- a. Metode LQ memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung.
- b. Metode LQ sederhana dan tidak mahal serta dapat di terapkan pada data historis untuk mengetahui tren.

C. Kelemahan Metode Locational Quotient (LQ)

Beberapa kelemahan metode LQ adalah:

- a. Berasumsi pola permintaan disetiap daerah identik dengan pola permintaan bangsa dan bahwa bahwa produktivitas tiap pekerja dalam industri-industri nasional.
- b. Berasumsi bahwa tingkat ekspor tergantung pada tingkat di sagnegasi.
- c. Asumsi bahwa pendekatan ini menganggap bahwa semua daerah mengikuti nasional.

2.7.2 Analisis Shift and Share

Analisis shift-share juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi, metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan sedangkan metode shift-share memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan ekonomi nasional. Ada juga yang menamakan model analisis ini sebagai industrial mix analysis, karena komposisi industri yang ada sangat mempengaruhi laju pertumbuhan wilayah tersebut. Artinya, apakah industri yang berlokasi di wilayah tersebut termasuk ke dalam kelompok industri yang secara nasional

memang berkembang pesat dan bahwa industri tersebut cocok berlokasi di wilayah itu atau tidak.

Analisis shift-share dapat menggunakan variabel lapangan kerja atau nilai tambah. Akan tetapi, yang terbanyak digunakan adalah variabel lapangan kerja karena datanya lebih mudah diperoleh. Apabila menggunakan nilai tambah maka sebaiknya menggunakan data harga konstan (Tarigan, 2005).

Pertambahan lapangan kerja (employment) regional total ($r E \Delta$) dapat diurai menjadi komponen shift dan komponen share. Komponen share sering pula disebut komponen national share. Komponen national share (N) adalah banyaknya pertambahan lapangan kerja regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode studi. Hal ini dapat dipakai sebagai kriteria bagi daerah yang bersangkutan untuk mengukur apakah daerah itu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata. Komponen "shift" adalah penyimpangan (deviation) dari national share dalam pertumbuhan lapangan kerja regional. Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat merosot dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja secara nasional. Bagi setiap daerah, shift netto dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu proportional shift component (P) dan differential shift component (D).

Proportional shift component (P) kadang-kadang dikenal sebagai komponen struktural atau industrial mix, mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan negatif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang merosot.

Differential shift component (D) kadang-kadang dinamakan komponen lokasional atau regional adalah sisa kelebihan. Komponen ini mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan daripada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern. Jadi, suatu

daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah/efisien, akan mempunyai differential shift component yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif.

Kedua komponen shift ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat ekstern dan yang bersifat intern. Proportional shift adalah akibat dari pengaruh unsur-unsur luar yang bekerja secara nasional, sedangkan differential shift adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja khusus di daerah yang bersangkutan. Untuk mengetahui pergeseran kontribusi (proportional dan differential shift) dan sumbangannya terhadap sistem perekonomian yang lebih luas (share), maka digunakan metode analisis shift and share.

Analisis shift-share menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan ekonomi nasional.

Shift-Share digunakan untuk melihat adanya perubahan kesempatan kerja atau produksi suatu wilayah dan daerah yang disebabkan oleh perubahan kesempatan kerja atau produksi ruang lingkup regional secara umum. Tujuan dari analisis shift-share ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih luas (wilayah referensi).

Asumsi menggunakan metode ini adalah bahwa laju perkembangan sosial ekonomi relatif tetap sehingga data yang digunakan dapat diwakili oleh data tahun awal dan data tahun terakhir. Pemilihan metoda pergeseran analisis ini berdasarkan kemampuannya untuk menyelidiki karakteristik pertumbuhan wilayah didalam sistem yang lebih luas (nasional). Dengan demikian diharapkan penggunaan metoda ini akan dapat mengetahui potensi setiap kecamatan dalam pertumbuhan wilayah perencanaan.

Dari hasil analisis shift and share diperoleh gambaran kinerja aktifitas disuatu wilayah sebagai berikut:

a. Perhitungan National Share

Peranan National Share adalah seandainya pertambahan PDRB regional sektor i tersebut sama dengan proporsi pertambahan PDRB nasional secara rata-rata.

$$\text{Rumus : } \boxed{Ns_{i,t} = E_{r,i,t-n} \left(\frac{E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) - E_{r,i,t-n}} \dots\dots\dots (2)$$

b. Perhitungan Proportional Share

Proportional Share adalah melihat pengaruh sektor i secara nasional terhadap pertumbuhan PDRB sektor i pada region yang dianalisis, dengan kata lain proportional share menunjukkan juga apakah pertumbuhan ekonomi padasektor tersebut lebih cepat (+) atau lebih lambat (-) daripada pertumbuhan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

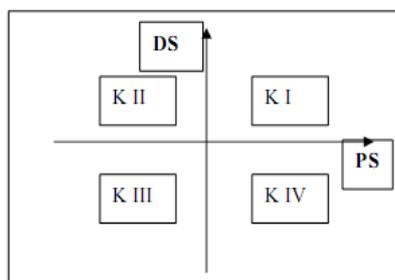
$$\text{Rumus : } \boxed{p_{r,i,t} = \left\{ \left(\frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - \left(\frac{E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) \right\} \times E_{r,i,t-n}} \dots\dots\dots (3)$$

c. Perhitungan Differential Shift

Ukuran ini menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi suatu aktivitas/sektor tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor/aktivitas tersebut dalam wilayah. Komponen ini menggambarkan dinamika (keunggulan/ketidakeunggulan) suatu sektor/aktivitas tertentu di sub wilayah tertentu terhadap aktivitas tersebut di sub wilayah lain. Atau untuk membandingkan posisi aktivitas ekonomi lokal/wilayah (kabupaten/kota) terhadap aktivitas ekonomi wilayah yang lebih luas (provinsi) pada sektor yang sama. Differential shift positif menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor tersebut adalah kompetitif.

$$\text{Rumus : } \boxed{D_{r,i,t} = \left\{ E_{r,i,t} - \left(\frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) \right\} \times E_{r,i,t-n}}$$

Kombinasi hasil analisis shift dan share tersebut akan menghasilkan empat indikator, yaitu :



Keterangan :

PS = Proportional Share

DS = Differential Shift

K = Kuadran

Interpretasi :

- K I = Bila nilai proportional share dan differential shift bernilai positif diartikan bahwa sektor ini mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian kota (kontribusinya cenderung naik) dan naik terhadap sistem perekonomian yang lebih luas (provinsi).
- K II = Bila nilai proportional share bernilai negatif dan differential shift bernilai positif, artinya sektor ini hanya dapat meningkatkan peranannya dalam lingkup internal (kota) saja.
- K III = Bila nilai proportional share bernilai negatif dan differential shift bernilai negatif, artinya sektor tersebut tidak mempunyai peranan dalam memajukan perekonomian internal (kota) maupun eksternal (provinsi).
- K IV = Bila nilai proportional share bernilai positif dan differential shift negatif, berarti sektor tersebut hanya dapat meningkatkan peranannya dalam wilayah yang lebih luas (provinsi), tetapi tidak dapat meningkatkan perekonomian internal (kota).

A. Keunggulan Analisis Shift – Share

Keunggulan analisis Shift – Share antara lain:

- a. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis Shift – Share tergolong sederhana.
- b. Memungkinkan seseorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat.
- c. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

B. Kelemahan Analisis Shift – Share

Kelemahan analisis shift – share antara lain:

1. Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak lengkap.
2. Analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan mengingat bahwa regional shift tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.
3. Tidak dapat di pakai untuk melihat keterkaitan antar sektor.
4. Tidak ada keterkaitan antar daerah.

2.7.3 Analisis Multiflier Effect

Teori multiplier regional yang dikemukakan oleh John Glasson (1987) menerangkan saling berkaitan antara sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah serta kekuatan-kekuatan pendorong salah satu sektor ke sektor yang lainnya secara langsung maupun tidak langsung adalah teori basis ekonomi (Jhon Glasson,1987).

Menurut John Glasson, perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor yaitu kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Kegiatan-kegiatan basis (basic activities) adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa, dan menjualnya atau memasarkan produk-produknya keluar daerah. Sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis (non basic activities) adalah usaha ekonomi yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam wilayah ekonomi daerah yang bersangkutan

saja. Artinya kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis tidak menghasilkan produk untuk diekspor ke luar daerahnya. Oleh karena itu, ruang lingkup produksi mereka itu dan daerah pemasarannya masih bersifat lokal (Jhon Glasson ,1987).

Menurut teori ini meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi basis di dalam suatu daerah, akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di daerah itu dan akan mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi bukan basis (effect multiplier). Sebaliknya apabila terjadi penurunan jumlah kegiatan basis, akan berakibat berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, dan selanjutnya akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh kegiatan bukan basis. (Paul Sitohang, 1977).

Dampak pengganda suatu sektor dirumuskan sebagai berikut :

$$r_i = \frac{E_{si}}{E_{bi}} \dots\dots\dots (4)$$

Dimana r merupakan efek pengganda (multiplier effect), E_{si} adalah aktivitas sektor non basis, dan E_{bi} merupakan aktivitas sektor basis. Aktivitas sektor basis dirumuskan sebagai berikut :

$$E_{bi} = E_{iR} - \left[\frac{E_{iN}}{E_N} \right] E_R \dots\dots\dots (5)$$

Sedangkan untuk menghitung aktivitas non basis digunakan rumus sebagai berikut :

$$E_{si} = E_{iR} - E_{bi} \dots\dots\dots (6)$$

Dimana :

E_{iR} : Produksi sector I di daerah yang diselidiki

E_R : Produksi seluruhnya (Total Produksi) didaerah yang diselidiki

E_{iN} : Produksi sector i di seluruh daerah yang lebih luas dimana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya

E_{iR} : Produksi seluruhnya (Total Produksi) di seluruh daerah yag lebih luas dimana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya

2.7.4 Analisis Input-Output

Analisis Input – Output adalah suatu analisis atas perekonomian wilayah secara comprehensive karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di wilayah secara keseluruhan (Richardson, 1978). Dengan demikian apabila terjadi perubahan tingkat produksi atas sektor tertentu, dampaknya terhadap sektor lain dapat dilihat. Selain itu analisis ini juga terkait dengan tingkat kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut melalui input primer (nilai tambah). Artinya akibat perubahan tingkat produksi sektor-sektor tersebut, dapat dilihat seberapa besar kemakmuran masyarakat bertambah/berkurang. Setiap produksi pasti membutuhkan Input agar produksi itu dapat dihasilkan. Hasil produksi dapat langsung di konsumsi atau sebagai input untuk menghasilkan produk lain atau input untuk produk yang sama pada putaran berikutnya.

Hal ini menggambarkan bahwa sektor-sektor dalam perekonomian wilayah saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Kaitan itu bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena keterkaitan yang begitu luas, perubahan pada salah satu sektor misalnya Output-nya meningkat atau menurun, akan memberikan dampak pada sektor lainnya. Perubahan ini umumnya berasal dari perubahannya permintaan akhir dari salah satu sektor atau beberapa sektor sekaligus. Apabila permintaan akhir suatu sektor berubah, ini akan mengubah permintaannya (berupa input) dari berbagai sektor dan perubahan ini akan berlangsung dalam beberapa putaran. Akan tetapi besarnya permintaan akan menurun untuk setiap putaran berikutnya sehingga akhirnya dampak dari putaran itu dapat diabaikan. Tabel Input – Output beserta analisisnya adalah alat yang ampuh untuk menganalisa perekonomian wilayah dan sangat berguna dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. (Tarigan, 2005)

A. Manfaat/Kegunaan Analisis Input-Output ,dapat disimpulkan tentang kegunaan analisis input-output, yaitu sebagai berikut:

1. Menggambarkan kaitan antar sektor sehingga memperluas wawasan terhadap perekonomian wilayah. Dapat dilihat bahwa perekonomian wilayah bukan lagi sebagai kumpulan sektor-sektor, melainkan merupakan satu sistem yang saling

berhubungan. Perubahan pada salah satu sektor akan langsung mempengaruhi keseluruhan sektor walaupun perubahan itu akan terjadi secara bertahap.

2. Dapat digunakan untuk mengetahui daya menarik (backward linkage) dan daya mendorong (forward linkage) dari setiap sektor sehingga mudah menetapkan sektor mana yang dijadikan sebagai sektor strategis dalam perencanaan pembangunan perekonomian wilayah.
3. Dapat meramalkan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan tingkat kemakmuran, seandainya permintaan akhir dari beberapa sektor diketahui akan meningkat. Hal ini dapat dianalisis melalui kenaikan input antara dan kenaikan input primer yang merupakan nilai tambah (kemakmuran)
4. Sebagai salah satu alat analisis yang penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah karena bisa melihat permasalahan secara komprehensif.
5. Dapat digunakan sebagai bahan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dan modal dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah, seandainya inputnya dinyatakan dalam bentuk tenaga kerja atau modal.

B. Tabel Transaksi Dalam Metode Input-Output

Dalam metode input-output, sebagai tabel dasar adalah tabel transaksi. Tabel analisisnya antara lain terdiri atas tabel koefisien input atau disebut juga matriks koefisien input, tabel/matriks pengganda, tabel indeks daya menarik dan indeks daya mendorong serta berbagai tabel penduduk dari analisis lainnya tergantung kepada luasnya sektor yang hendak dibahas. Format tabel transaksi yang lengkap adalah seperti tertera berikut ini.

Tabel II.1
Format Tabel Transaksi

Sumber input	Alokasi Output		Total penyediaan	
	Permintaan antara	Permintaan akhir	Impor	Jumlah output
a. Input antara	Sektor produksi Kuadran I	Kuadran II		
Sektor 1	$x_{11} \dots x_{1j} \dots x_{1m}$	F_1	M_1	X_1
Sektor 2	$x_{21} \dots x_{2j} \dots x_{2m}$	F_2	M_2	X_2
...
Sektor i	$x_{i1} \dots x_{ij} \dots x_{im}$	F_i	M_i	X_i
...
Sektor n	$x_{n1} \dots x_{nj} \dots x_{nm}$	F_n	M_n	X_n

Sumber input	Alokasi Output		Total penyediaan	
	Permintaan antara	Permintaan akhir	Impor	Jumlah output
	Kuadran III			
b. Input primer	$V_i \dots V_j \dots V_m$	Kuadran IV		
Jumlah input	$x_i \dots x_j \dots x_m$			

Kuadran I terdiri atas transaksi antar sektor/kegiatan, yaitu arus barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu sektor untuk digunakan oleh sektor lain (termasuk sektor itu sendiri), baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penolong. Artinya, barang dan jasa itu dibeli untuk kebutuhan proses produksi yang hasil akhirnya akan dijual kembali pada putaran berikutnya. Matriks yang ada dalam Kuadran I merupakan sistem produksi dan bersifat endogen, sedangkan matriks yang berada di luar Kuadran I (Kuadran II, III, dan IV) bersifat eksogen.

Endogen artinya tidak mampu berubah karena pengaruh dari dalam diri sendiri, perubahan hanya terjadi karena pengaruh dari luar. Kuadran II terdiri atas permintaan akhir, yaitu barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat untuk dikonsumsi (habis terpakai) dan untuk investasi. Termasuk permintaan akhir ini adalah barang/jasa yang dibeli oleh masyarakat umum, dibeli oleh pemerintah, digunakan untuk investasi, diekspor ke luar negeri/ke luar wilayah, dan tidak lagi berada didalam negeri/wilayah karena habis terpakai.

Kuadran III berisikan input primer, yaitu semua daya dan dana yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk tetapi di luar kategori input antara. Termasuk dalam kategori ini adalah tenaga kerja, keahlian, modal, peralatan, bangunan dan tanah. Sumbangan masing-masing pihak dihitung sesuai dengan balas jasa yang diterimanya karena keikutsertaannya dalam proses produksi. Misalnya, tenaga kerja mendapat upah/gaji, keahlian mendapat tunjangan/bonus, modal mendapat bunga atau laba, peralatan/bangunan/tanah mendapat sewa atau tergabung dalam laba. Apa yang tertera dalam Kuadran III adalah balas jasa bagi faktor-faktor produksi dan karenanya merupakan pendapatan yang menggambarkan kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut seandainya seluruh faktor produksi dimiliki oleh masyarakat setempat. Jumlah keseluruhan balas jasa tersebut adalah sama dengan nilai tambah bruto wilayah tersebut.

Kuadran IV menggambarkan bagaimana balas jasa yang diterima input primer didistribusikan ke dalam permintaan akhir. Karena tidak dibutuhkan dalam analisis input-output sedangkan pengumpulan datanya memerlukan survei yang rumit, kuadran ini sering diabaikan di dalam tabel input-output. (Tarigan, 2005).

C. Matriks Koefisien Input

Matriks koefisien input adalah sama dengan tabel koefisien input tetapi tanpa mengikutsertakan input primer. Tanpa input primer, isi tabel akan berbentuk $n \times n$ (jumlah baris sama dengan jumlah kolom) sehingga lebih lazim disebut matriks koefisien input. Nilai koefisien input untuk masing-masing sel dapat dihitung dengan rumus: (Tarigan, 2005)

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j} \dots\dots\dots(7)$$

Dimana :

α_{ij} : Koefisien input sector j dari sector I (berada pada baris I kolom j)

x_{ij} : Penggunaan input oleh sector j dan sector i

x_i : Output sector j

D. Matriks Pengganda

Matriks pengganda adalah faktor yang menentukan besarnya perubahan pada keseluruhan sektor seandainya jumlah produksi suatu sektor ada yang berubah. Matriks pengganda dibutuhkan dalam memproyeksikan dampak dari perubahan salah satu sektor terhadap keseluruhan sektor. Apakah matriks pengganda dikalikan dengan matriks permintaan akhir (yang diproyeksikan berubah) akan menghasilkan output baru untuk keseluruhan sektor. Langkah-langkah untuk memproyeksikan perubahan output keseluruhan sektor adalah sebagai berikut:

1. Dari tabel transaksi, hitung matriks koefisien input (matriks A).
2. Hitung matriks (I-A), yaitu matriks identitas (identity matrix) dikurangi matriks koefisien input.
3. Hitung matriks pengganda, yaitu kebalikan (inverse) dari matriks (I-A) matriks pengganda = (I-A).

4. Proyeksikan dampak perubahan yang terjadi dengan cara matriks pengganda dikalikan matriks permintaan akhir yang berubah (Tarigan, 2005)

E. Daya Menarik dan Derajat Kepekaan

Hubungan antara output dengan koefisien pengganda dan permintaan akhir dapat dirumuskan dalam suatu persamaan matriks seperti tertera berikut ini.

Bentuk hubungan antara Output, Koefisien pengganda, dan Permintaan Akhir

$$\begin{pmatrix} X \\ \dots \\ X_i \\ \dots \\ X_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} \dots b_{1j} \dots b_{1n} \\ \dots \\ b_{i1} \dots b_{ij} \dots b_{in} \\ \dots \\ b_{n1} \dots b_{nj} \dots b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_1 \\ \dots \\ F_i \\ \dots \\ F_n \end{pmatrix}$$

Dimana :

- B_{ij} : Isis el baris ke-I kolom k-j dari matriks kebalikan $(I-A)^{-1}$
- X_i : Output sector i
- F_i : Permintaan akhir sector i
- ij : 1,2,...,n

Hal di atas dapat pula ditulis dalam persamaan matriks yang lebih ringkas sebagai berikut.

$$X = (I-A)^{-1} F \dots\dots\dots(8)$$

Dari persamaan hubungan di atas terlihat bahwa setiap perubahan permintaan akhir dari sektor 1 (F_1) sebagai 1 unit akan mengakibatkan perubahan pada X_1 sebesar b_{11} terhadap X_2 sebesar b_{21} , terhadap X_3 sebesar b_{31} , dan seterusnya. Secara umum jumlah dampak yang ditimbulkan oleh sektor i terhadap sektor j adalah :

$$r_j = b_{1j} + b_{2j} + b_{3j} + \dots + b_{nj} = \sum_j b_{ij} \dots\dots\dots(9)$$

Dimana :

r_j = Jumlah dampak perubahan permintaan akhir sektor j terhadap seluruh perekonomian.

b_{ij} = Dampak yang terjadi terhadap sektor i karena perubahan pada sektor j.

2.7.5 Distribusi Struggess

Distribusi Struggess ini merupakan cara yang tepat untuk menyusun suatu rangkaian data dengan menggolongkan besar kecilnya angka-angka tersebut kedalam kelas-kelas tertentu (Anto Dayan. 1981). Secara teoritis menurut metoda ini penentuan jumlah kelas yang akan digunakan umumnya tergantung pada pertimbangan-pertimbangan praktis yang masuk akal dari pengolah data, sehingga dihasilkan satu kesimpulan yang menyeluruh dengan menggunakan rumus Struggess, sebagai berikut :

1. Secara matematis persamaan untuk menentukan jumlah kelas interval adalah :

$$k = 1 + 3,322 \log n$$

$$k = \text{jumlah kelas interval}$$

$$n = \text{jumlah data observasi}$$
2. Menghitung jumlah rentang data yaitu data terbesar di kurangi data terkecil.
3. Menghitung panjang kelas = rentang dibagi jumlah kelas.

2.7.6 Analisis AHP

Menurut Saaty (2001) menyatakan bahwa proses hirarki analitik (AHP) menyediakan kerangka yang memungkinkan untuk membuat suatu keputusan efektif atas isu kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pendukung keputusan. Pada dasarnya AHP adalah suatu metode dalam merinci suatu situasi yang kompleks, yang terstruktur kedalam suatu komponen-komponennya. Artinya dengan menggunakan pendekatan AHP kita dapat memecahkan suatu masalah dalam pengambilan keputusan.

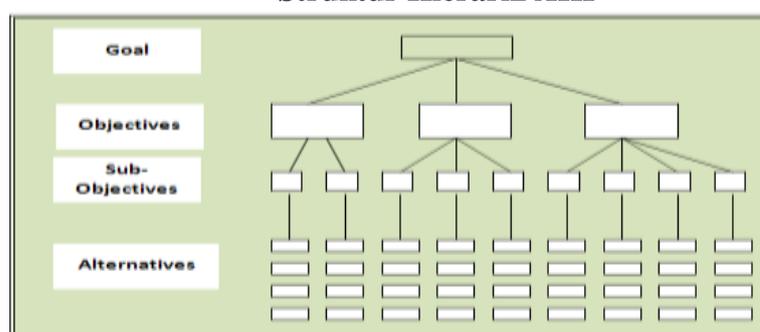
Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategis, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas

tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut (Marimin, 2004). Pada dasarnya langkah-langkah dalam metode AHP meliputi :

1. Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi.

Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi struktur hierarki seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Hierarki AHP



Gambar Struktur Hierarki AHP (Analytical Hierarchy Process), Marimin (2004)

2. Penilaian kriteria dan alternatif

Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (1988), untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan

Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya Proses

perbandingan berpasangan, dimulai dari level hirarki paling atas yang ditujukan untuk memilih kriteria.

Dalam AHP ini, penilaian alternatif dapat dilakukan dengan metode langsung (*direct*), yaitu metode yang digunakan untuk memasukkan data kuantitatif. Biasanya nilai-nilai ini berasal dari sebuah analisis sebelumnya atau dari pengalaman dan pengertian yang detail dari masalah keputusan tersebut. Jika si pengambil keputusan memiliki pengalaman atau pemahaman yang besar mengenai masalah keputusan yang dihadapi, maka dia dapat langsung memasukkan pembobotan dari setiap alternatif.

3. Penentuan prioritas

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik. Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Kuadratkan matriks hasil perbandingan berpasangan.
- b. Hitung jumlah nilai dari setiap baris, kemudian lakukan normalisasi matriks.

4. Konsistensi Logis

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Matriks bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara berpasangan tersebut harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut (Suryadi & Ramdhani, 1998):

Hubungan kardinal : $a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$

Hubungan ordinal : $A_i > A_j, A_j > A_k$ maka $A_i > A_k$

Penghitungan konsistensi logis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengalikan matriks dengan prioritas bersesuaian.
- b. Menjumlahkan hasil perkalian per baris.
- c. Hasil penjumlahan tiap baris dibagi prioritas bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan.
- d. Hasil c dibagi jumlah elemen, akan didapat λ_{maks} .
- e. Indeks Konsistensi (CI) = $(\lambda_{maks}-n) / (n-1)$
- f. Rasio Konsistensi = CI/ RI, di mana RI adalah indeks random konsistensi. Jika rasio konsistensi ≤ 0.1 , hasil perhitungan data dapat dibenarkan.

2.7.7 Standar Deviasi

Standar Deviasi adalah pengukuran untuk penyimpangan standar yang konsisten untuk semua distribusi normal. Pada distribusi normal probabilitas diukur berdasarkan jumlah deviasi standar variabel acak X nilai adalah dari Mean.

1. Deviasi Populasi

$$\text{Rumus : } \sigma = \sqrt{\sum(x-\mu)^2/N} \dots\dots\dots(10)$$

Keterangan :

- σ = Standar Deviasi
- μ = Nilai Rata-Rata dalam populasi
- x = Nilai Setiap data populasi
- N = Jumlah total data
- \sum = Simbol operasi penjumlahan

2. Deviasi Sample

$$\text{Rumus : } S = \sqrt{\sum(x-\bar{x})^2/N-1} \dots\dots\dots(11)$$

Keterangan :

- S = Standar Deviasi
- \bar{x} = Nilai Rata-Rata dalam populasi
- x = Nilai Setiap data populasi
- N = Jumlah total data
- \sum = Simbol operasi penjumlahan

2.8 Studi Terkait

Pada bagian ini akan dibahas tentang studi terdahulu, dimana hal ini dilakukan sebagai acuan sebelum melakukan penelitian. Sehingga penelitian yang

dilakukan telah mendapatkan gambaran kondisi prosedur pelaksanaan maupun pengerjaan laporannya.

2.8.1 Studi Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sulawesi Tengah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi dan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam menganalisis studi tersebut menggunakan metode :

1. Analisis Location Quotient (LQ)

Location Quotient adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu membaginya menjadi dua golongan yaitu sektor basis dan sektor non basis. Analisis Location Quotient dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah.

2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dilakukan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi, terutama struktur ekonomi kabupaten / kota maupun Provinsi Sulawesi Tengah, yang lebih menekankan pada kriteria pertumbuhan. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan kegiatan membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih kecil maupun dalam skala yang lebih luas. Terdapat dua rasio pertumbuhan dalam analisis tersebut, yaitu (a) rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) dan (b) rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr). Pada dasarnya alat analisis ini sama dengan LQ, namun perbedaannya terletak pada kriteria perhitungan dimana LQ menggunakan kriteria distribusi sedangkan MRP menggunakan kriteria pertumbuhan.

3. Analisis Shift Share

Teknik analisis S–S digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis menganalisis kinerja sektor-sektor ekonomi masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah Sulawesi Tengah serta menentukan sektor-sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi, dimana keunggulan kompetitif merupakan kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya diluar daerah/luar negeri/pasar global. (Robinson,2005). Teknik ini memilih pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah dalam kurun waktu tertentu yang terdiri atas perubahan sebagai akibat dari pengaruh pertumbuhan wilayah di atasnya (N), bauran industri (M) serta keunggulan kompetitif atau persaingan (C). Pengaruh pertumbuhan dari daerah di atasnya disebut pangsa (share), pengaruh bauran industri disebut *proporsional shift* dan pengaruh keunggulan kompetitif (persaingan) disebut *differential shift* atau *regional share*.

4. Penentuan Tipologi Daerah

Klassen Tipology pada dasarnya membagi daerah berdasarkan 2 (dua) indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horisontal, daerah yang diamati dapat menjadi 4 klasifikasi (Soepono, 1993; Sjafrizal, 1997; Kuncoro dan Aswandi , 2002) yaitu :

- Tipologi I : Daerah Cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) adalah Kabupaten/kota yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rata-rata diatas pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah dan pendapatan perkapita diatas rata-rata pendapat perkapita Sulawesi Tengah .
- Tipologi 2 : Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah Kabupaten yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rata-rata lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah dan pendapatan perkapita lebih tinggi rata-rata diatas pendapatan perkapita Sulawesi Tengah.
- Tipologi 3 : Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) merupakan Kabupaten/kota yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB

rata-rata lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah dan pendapatan perkapita lebih rendah rata-rata diatas pendapatan perkapita Sulawesi Tengah.

- Tipologi 4 : Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai laju rata-rata pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita lebih rendah dari rata-rata laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita Sulawesi tengah.
5. Menentukan prioritas sektor basis untuk pengembangan pembangunan Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Dari hasil analisis LQ, S-S untuk keunggulan kompetitif dan spesialisasi serta tipologi daerah yang semuanya diskorkan sesuai dengan range yang ada di masing-masing sektor, maka dapat ditentukan wilayah yang diprioritaskan dalam pengembangan pembangunan bagi sektor-sektor yang potensial di Kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah. Interval kelas mengikuti Tipologi Daerah, sedangkan rangenya (Purbayu dan Ashari, 2003) adalah:

$$R = \frac{\text{Nilai Terbesar} - \text{nilai Terkecil}}{\text{Kelas}}$$

6. Metode SIG untuk Pemetaan

Peta merupakan data kualitatif ataupun yang disajikan dalam bentuk titik dan garis yang ditujukan untuk memperlihatkan tampilan proses studi langsung pada gambaran wilayah studi. Menurut Kustiwan dan Iwan (1997) Pembuatan peta melalui tehnik superimpose, yaitu menganalisis objek studi melalui peta dengan cara menumpang susunkan antara peta satu dengan lainnya, akan memberikan hasil maksimal, sehingga menghasilkan informasi yang diinginkan secara spasial.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor Pertanian merupakan sektor basis yang dominan di Propinsi Sulawesi Tengah karena terdapat di 9 Kabupaten dari 10 Kabupaten/Kota; Sektor Listrik Gas dan Air Bersih, Sektor Bangunan dan sektor Jasa-Jasa terdapat di 2 Kabupaten/Kota; Sektor Pengangkutan dan, sektor Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan

terdapat di 3 Kabupaten / Kota; Sektor Industri Pengolahan 6 Kabupaten/Kota dan Sektor Perdagangan Hotel, Restoran 4 Kabupaten/Kota; Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian hanya dimiliki Kota Palu. Kota Palu mempunyai sektor basis terbanyak dengan 8 sektor basis; dan yang mempunyai sektor basis paling sedikit (2 sektor basis) adalah Kabupaten Morowali, Donggala, Toli-Toli, Buol dan Parigi Moutong.

2. Hasil Analisis MRP yang di overlay menunjukkan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah tidak satupun mempunyai potensi daya saing kompetitif dan komparatif atau masuk kriteria pertama bernotasi (++++) untuk ketiga komponen; Sebaliknya terdapat 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Morowali, Donggala, Toli-Toli dan Kabupaten Buol yang memiliki sektor ekonomi yang bernotasi negatif (---) untuk ketiga komponen dengan sektor yang sama yaitu sektor Pertambangan, Penggalian; Sektor Listrik, Gas, Air Bersih; dan sektor Bangunan serta sektor Pengangkutan, Telekomunikasi.
3. Hasil Analisis Shift-Share di Propinsi Sulawesi Tengah menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat satupun Kabupaten/Kota yang memiliki sektor yang mempunyai keunggulan/daya saing kompetitif, tetapi hanya memiliki spesialisasi.
 - Sektor Listrik, Gas, Air Bersih; Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran dan Sektor Jasa-Jasa, mempunyai spesialisasi di 6 Kabupaten/Kota;
 - Industri Pengolahan; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; mempunyai spesialisasi di 5 Kabupaten
 - Sektor Pertanian; Sektor Pertambangan dan Penggalian spesialisasi di 4 Kabupaten
 - Sektor Bangunan; mempunyai spesialisasi di 2 Kabupaten.

Tidak semua sektor basis di Kabupaten/Kota mempunyai spesialisasi demikian pula sebaliknya tidak semua yang masuk kriteria spesialisasi belum tentu sebagai sektor basis.

4. Berdasarkan Tipologi Klassen dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah tidak terdapat satupun Kabupaten/Kota yang masuk dalam Tipologi Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh (klasifikasi I) serta Tipologi Daerah Berkembang Cepat (klasifikasi III). Tipologi Daerah Maju Tapi Tertekan (klasifikasi II) mencakup Kabupaten Banggai; Toli-Toli dan Kota Palu, sedangkan 7 Kabupaten lainnya masuk pada Tipologi Daerah Relatif Tertinggal meliputi Kabupaten Banggai Kepulauan; Morowali, Poso, Donggala, Buol; Parigi Moutong dan Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Menentukan Prioritas Pengembangan Wilayah berdasarkan analisis LQ, Shift- Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral maka dapat ditentukan Kabupaten / Kota yang menjadi prioritas pengembangan masing- masing sektor. Prioritas pertama untuk sektor pertanian adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Poso, Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong; Sektor Pertambangan dan Penggalian di Kota Palu; Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Donggala, Buol dan Kabupaten Tojo Una-Una; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih di Kabupaten Tojo Una-Una; Sektor Bangunan di Kabupaten Tojo Una-Una; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Kabupaten Banggai Kepulauan, Poso, Donggala dan Kota Palu; Sektor Angkutan dan Komunikasi di Kabupaten Poso; Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan di Kabupaten Tojo Una-Una dan untuk Sektor Jasa-jasa diprioritaskan pengembangannya di Kabupaten Tojo Una-Una. Khusus Kabupaten Tojo Una-Una merupakan Kabupaten yang masuk dalam prioritas pertama untuk Pengembangan wilayah semua sektor basis yang dimilikinya 6 sektor. (Nudiatulhuda Mangun, Tesis 2007)

2.8.2 Strategi Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial Studi Kasus Kabupaten Mojokerto

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor potensial di Kabupaten Mojokerto dan menentukan strategi peningkatan perekonomian daerah melalui pengembangan

sektor ekonomi potensial di Kabupaten Mojokerto. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Laju Pertumbuhan Ekonomi, Analisis Shift-Share, Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Strategi Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial Dengan Analisis SWOT.

Penelitian identifikasi sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor potensial di Kabupaten Mojokerto dan menentukan strategi peningkatan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Mojokerto ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Pemerintah :

- a. Merupakan masukan yang sangat berharga bagi penentuan kebijakan peningkatan perekonomian Kabupaten Mojokerto yang akan datang.
- b. Menentukan strategi pengembangan sektor ekonomi potensial bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Mojokerto

2. Bagi masyarakat :

- a. Mendapatkan gambaran perekonomian Kabupaten Mojokerto ditinjau dari sektor-sektor ekonomi maupun perbandingan perekonomian dengan perekonomian Propinsi Jawa Timur.
- b. Membantu pemerintah untuk ikut berpartisipasi menggerakkan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Mojokerto, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Dari serangkaian analisis yang dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis shift share, mengelompokkan sektor / subsektor menurut kecepatan pertumbuhan dan tingkat daya saingnya ke dalam empat kuadran. Kuadran pertama dan kuadran kedua ditempati sektor / subsektor yang memiliki tingkat daya saing yang kuat, yaitu subsektor perikanan; subsector penggalian; subsektor industri semen dan barang galian bukan logam; subsektor hotel; subsektor lembaga keuangan bukan bank; subsektor sewa bangunan; subsektor jasa swasta; subsektor tanaman bahan makanan; subsektor tanaman perkebunan; subsektor peternakan; subsektor industry

makanan, minuman dan tembakau; subsektor air bersih dan subsektor jasa pemerintahan umum.

2. Berdasarkan pengelompokan sektor/subsektor dan pengamatan data empiris, terdapat dua sektor/subsektor potensial di Kabupaten Mojokerto yaitu sektor pertanian (subsektor tanaman bahan makanan) dan sektor industri pengolahan (subsektor industri makanan, minuman dan tembakau). Keadaan wilayah Kabupaten Mojokerto yang agraris dengan segala potensi sumber daya alamnya sangat mendukung pengembangan kedua sektor / subsector potensial tersebut guna peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Mojokerto.
3. Strategi peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Mojokerto dapat dilakukan melalui pengembangan potensi sektor industri pengolahan (subsektor industri makanan, minuman dan tembakau) yang berbasis lokal yang terbukti dapat bertahan (survive) pada masa krisis, namun tetap menjaga keberadaan serta peningkatan produktivitas sektor pertanian (subsektor tanaman bahan makanan). Dengan demikian strategi pengembangan sektor industri pengolahan (subsektor industri makanan, minuman dan tembakau) dapat dikendalikan dan dikontrol melalui kebijakan di sektor pertanian (subsektor tanaman bahan makanan) agar wilayah Kabupaten Mojokerto yang agraris tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan. (Agus Budhi Santosa, Tesis.2006).

2.8.3 Analisis Sektor Ekonomi Potensial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor/subsektor ekonomi potensial dan untuk mengetahui pola maupun struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Secara garis besar, analisis sektor dan subsektor ekonomi potensial dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi sektor dan subsektor ekonomi potensial dari sisi kontribusi PDRB (aspek keunggulan komparatif) melalui alat analisis *location quotient* (LQ) serta penentuan sektor dan subsektor ekonomi

potensi dari sisi pertumbuhan PDRB (aspek keunggulan kompetitif) melalui alat analisis MRP dan analisis *Shift-Share Estaban Marquillas* (SS-EM). Khusus mengenai identifikasi dan pengaruh spesialisasi perekonomian wilayah akan dijelaskan melalui analisis *Shift-Share Estaban Marquillas*. Selanjutnya setelah aspek keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif dan spesialisasi teridentifikasi, maka dilakukan analisis *overlay* yang bertujuan untuk melihat potensi sektor dan subsektor ekonomi di Kabupaten OKU Timur berdasarkan gabungan dari ketiga alat analisis tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan melalui berbagai alat analisis pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, spesialisasi serta struktur dan pola pertumbuhan ekonominya, maka subsektor tanaman perkebunan merupakan subsektor ekonomi potensial di Kabupaten OKU Timur. Dimana subsector perkebunan merupakan bagian dari sector pertanian, namun sector pertaniannya justru bukan merupakan sector potensial. Lebih lanjut, dari sisi sektor ekonomi belum ditemukan satupun sektor ekonomi potensial di Kabupaten OKU Timur.
2. Berdasarkan klasifikasi dengan menggunakan tipologi Klassen, maka Kabupaten OKU Timur memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah daripada Provinsi Sumatera Selatan, oleh karenanya Kabupaten OKU Timur termasuk dalam katagori kabupaten yang relatif tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi sektoral berdasarkan tipologi Klassen menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang maju dan tumbuh pesat di Kabupaten OKU Timur, sedangkan subsektor ekonomi yang maju dan tumbuh pesat adalah subsector tanaman perkebunan dan subsektor pemerintahan umum. (Mukti Riadi, Tugas Akhir 2008)

